

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Meroke memiliki potensi keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang sangat besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam memberdayakan kemajemukan masyarakat, suku, etnik, agama, bahasa, budaya, kelompok sosial, dan adat istiadat. Keberagaman dan kemajemukan tersebut merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam menyatukan keragaman dan kemajemukan tersebut diperlukan kearifan dan kecerdasan semua lapisan masyarakat, sehingga keberagaman dan kemajemukan tersebut menjadi potensi dalam menata masyarakat yang demokratis.

Lembaga Pesantren memiliki kekhasan tersendiri dalam mengelola keberagaman dan kemajemukan. Pemberdayaan keberagaman dan kemajemukan masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran serta pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Keterlibatan generasi muda khususnya kaum santri yang harus memiliki watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang matang. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan mempunyai peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pribadi santri.

Keberadaan sebuah Pesantren tidak terlepas dari peran Kyai sebagai sosok yang sangat dihormati dan diteladani di dunia Pesantren. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren, Kyai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan-kebijakan Pesantren seperti dalam penyelenggaraan pendidikan, perencanaan program pendidikan Pesantren dan mengendalikan seluruh kegiatan pendidikan di lingkungan Pesantren.

Pendidikan demokrasi hendaknya juga dikenalkan di lembaga pendidikan Pesantren, karena lembaga Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang melakukan proses mengembangkan potensi peserta didik (santri) berupa pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan dan kemauan, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi lingkungannya tidak hanya

dalam negara maupun masyarakat, bahkan di Pesantren pun hendaknya demokrasi dikenalkan terhadap santri. Santri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari generasi muda. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial bagi pembangunan Nasional.

Pesantren merupakan lembaga untuk melaksanakan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi di Pesantren dilaksanakan dengan melaksanakan nilai-nilai budaya demokrasi dalam berbagai kegiatan Pesantren, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Salah satu cara pengembangan nilai-nilai budaya demokrasi yaitu melalui proses pendidikan demokrasi. Proses pendidikan demokrasi dapat menghasilkan manusia yang demokratis yang memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa masyarakat demokratis dapat memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan secara baik dan benar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zamroni, (2011: 39).

Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia-manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa atas ide dan cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat demokratislah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan.

Demokrasi sebagai faham kebebasan yang mendunia, telah merambah ke berbagai pelosok lapisan kehidupan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan pesantren. Karena demokrasi telah memberikan corak dan warna tersendiri. Dari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang demokrasi, ditambah adanya perbedaan persepsi yang mendasar tentang demokrasi dalam mengimplementasikan, sehingga demokrasi sering disalah artikan.

Demokrasi yang sering dipahami oleh sebahagian masyarakat adalah kebebasan, dimana kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa memikirkan efek dari sebuah kebebasan yang mereka lakukan akan berdampak negatif. Banyak fenomena yang terjadi terkait demokrasi, misalnya kebebasan berpendapat ketika santri merasa terkungkung dengan banyaknya aturan yang diterapkan oleh

pesantren sehingga banyak anggapan, bahwa aturan tersebut tidak demokratis dan melanggar hak azasi manusia.

Untuk menyikapi masalah pemahaman tentang demokrasi yang salah tersebut maka perlunya sebuah kedewasaan dan kematangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya demokrasi. Karena kematangan pemahaman tentang nilai-nilai budaya demokrasi sangat penting karena akan memberikan arahan dan pemaknaan demokrasi secara benar dan tepat sasaran. Sebagaimana pendapat Sundawa, (2011) ...“ketidak matangan, ketidak dewasaan, dan ketidak arifan warga negara dalam mengimplementasikan demokrasi tidak terlepas dari kurang berhasilnya penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan”.

Sejalan dengan hal diatas demokrasi juga merupakan sebuah proses, dimana dalam pembelajaran demokrasi dibutuhkan proses yang teliti dan cermat guna terwujudnya demokrasi yang asli (*genuine*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Darmawan (2015 : 96-97) yang menyatakan bahwa:

Demokrasi itu adalah sebuah proses dan dalam prosesnya bukanlah milik penguasa melainkan milik rakyat karena rakyat merupakan ruh dari kehidupan demokrasi itu sendiri. Sehingga upaya demokratisasi dianggap sebagai pembelajaran demokrasi yang berorientasi kepada ideologi bangsa yaitu Pancasila, karena demokrasi itu tergantung pada ideologi suatu bangsa.

Pembudayaan demokrasi sesungguhnya adalah proses demokratisasi, dimana di dalam prosesnya dibutuhkan media sebagai pendukung proses tersebut. Dalam pembudayaan demokrasi atau disebut pendidikan demokrasi, media sangat berperan penting khususnya bagi seorang pendidik. Nilai-nilai demokrasi dan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) sangat berhubungan dan berkaitan erat. Sebagaimana Winataputra dan Budimansyah (2007: 61) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *civic disposition* adalah:

Kepribadian yang mencakup kesopanan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetian terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Dalam membentuk watak kewarganegaraan santri yang unggul, mandiri, pesantren memiliki tujuan tersendiri. Sebagai mana tujuan pendidikan Pesantren seperti yang dikemukakan oleh Mastuhu, (2007) yaitu:

Menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan menegakkan Islam dan kejayaan umat, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

Sementara Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam (Tujuan Pendidikan Pesantren) yaitu tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan secara umum diindikasikan jika mampu membentuk pola tingkah laku peserta didik (Santri). Pola tingkah laku tersebut dapat dibentuk dengan cara penanaman nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Zainal Aqib dan Sujak (2011: 3) berpendapat pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter (watak Kewarganegaraan) kepada warga sekolah (Pesantren) meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, sebagai masyarakat dan warga negara yang baik.

Dari tujuan pesantren, dipahami bahwa membentuk watak kewarganegaraan santri sangat dibutuhkan, sehingga dengan demikian santri akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan siswa di sekolah pada umumnya. Hal ini bisa kita lihat dari keteraturan dan kedisiplinan Pesantren dalam mengkondisikan santrinya. Selain itu santri akan terjaga dan dapat menerapkan nilai-nilai demokratis secara baik di lingkungan pesantren dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Pesantren dan sekolah formal pada umumnya. Sebagaimana Dhofier, (1982), berpendapat ...“pesantren merupakan salah satu “benteng moral bangsa dan *indigenous* Indonesia”.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana seperti yang tertuang dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Berdasarkan penjelasan UU diatas sesungguhnya pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik intelektual, sosial, maupun spiritual. Pembentukan manusia yang berkualitas secara intelek mutlak harus diiringi dengan upaya peningkatan kualitas keimanan sebagai salah satu komitmen bangsa, sebagaimana seperti yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain pesantren sebagai lembaga pendidikan sangat diharapkan peran sertanya dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan nilai-nilai demokrasi. Sehingga pemahaman nilai-nilai demokrasi kepada santri melalui pengembangan dan pembentukan watak kewarganegaraan santri mampu menghadapi realitas sosial dalam kehidupan. Penanaman nilai-nilai demokrasi ini dilakukan dalam rangka membina santri agar mereka tidak tercabut dari akar budaya demokrasi yang seutuhnya ketika mereka berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi.

Untuk mengembangkan dan membentuk watak kewarganegaraan santri, proses pendidikan yang dilakukan di Pesantren dengan berbagai cara yaitu; a) keteladanan; b) latihan dan pembiasaan; c) mendidik melalui *ibrah* (mengambil pelajaran); d) mendidik melalui *mauidzah* (nasehat); e) mendidik melalui disiplin; dan f) mendidik *targhib wa tarhib* (bujukan dan ancaman). Pembentukan warga negara yang baik (Demokratis) sebagai unsur pengembangan kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Sehubungan dengan itu, Winataputra dan Budimanysah (2012 : 234-235), menjelaskan bahwa :

Civic Education memiliki paradigma dasar yaitu *Civic Culture*. Sedangkan *Civic Culture* memiliki ketergantungan dan saling

ketergantungan (*interdependence*) dengan *political culture*. Kemudian *Civic Culture* sendiri menjadi pengembang dari elemen penting *civic education* yaitu *civic virtue* dan *civic virtue* sendiri berkaitan dengan domain psikososial individu yang secara substantif mengembangkan unsur *civic disposition* dan *civic commitments*. Hal inilah yang diperlukan untuk kebiasaan berpikir warga negara demi berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Jadi dapat dipahami bahwa *civic education* berhubungan erat dengan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan *Civic Culture* dan dengan *Civic Culture* tumbuhlah elemen *civic disposition* dan *civic commitments* pada warga negara. Hal di atas tentunya sejalan dengan apa yang dirangkum oleh Winataputra (2012 : 234-235) yakni;

Elemen *civic culture* yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah *civic virtue*. *Civic virtue* yang dimaksud adalah kemauan warganegara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic virtue* sendiri secara substantif memiliki dua unsur yaitu unsur *civic dispositions* dan *civic commitments*. *Civic dispositions* yang dimaksud adalah sikap dan kebiasaan berfikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sementara *civic commitments* yang dimaksud adalah komitmen warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Dengan *civic dispositions* dan *civic commitments* tersebut diyakini dapat melahirkan *the common good* atau terwujudnya kemaslahatan kepentingan umum. Berikut beberapa indikator dari *civic dispositions* dan *civic commitments* dalam membangun *civic culture* dalam kehidupan demokrasi. *Civic dispositions* :

1. Secara konseptual bahwa *civic dispositions* membangun kepribadian yakni *civility* yaitu hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat,
2. Individual yang *responsibility* atau bertanggung jawab,
3. Individual yang disiplin,
4. *Civic-mindednes* (kepekaan warganegara),
5. *Open-mindednes* (sikap keterbukaan),
6. *Tolerantion of diversity* (toleransi terhadap keberagaman),

7. *Persistence* (keteguhan),
8. *Compassion* (keterharuan),
9. *Generosity* (kemurahan hati),
10. Dan *loyalty to the nation and its principles* atau kesetiaan pada negara dan segala aturannya (Quigley dalam Winataputra dan Budimansyah, 2012 : 234-235).

B. Rumusan Masalah

Supaya masalah yang dibahas dalam desain riset ini tidak melebar dan keluar dari fokus yang telah ditentukan, maka dalam hal ini peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian. Adapun fokus masalah yang menjadi kajian dalam riset ini adalah berkaitan dengan “**Membudayakan Nilai-Nilai Demokrasi Di Pesantren Untuk Membentuk Watak Kewarganegaraan Santri** (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung)”.

Untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan dalam rumusan masalah dibawah ini. Berdasarkan pada latar belakang di atas, saya membuat rumusan masalah yang akan dijawab pada saat melakukan penelitian nanti. Adapun rumusan masalah dalam sebuah penelitian dapat dibagi dua, yaitu rumusan masalah secara umum dan rumusan masalah secara khusus. Rumusan masalah secara umum adalah rumusan masalah yang mencakup keseluruhan dari hal atau masalah yang akan dicari jawabannya pada saat melakukan penelitian. Dalam rancangan penelitian ini yang menjadi rumusan masalah secara umum adalah kajian tentang bagaimana membudayakan nilai-nilai demokrasi di Pesantren mampu membentuk watak kewarganegaraan santri, (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung). Sedangkan rumusan masalah secara khusus dalam rancangan penelitian ini adalah:

1. Nilai-nilai demokrasi seperti apa yang ada di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung?
2. Budaya demokrasi seperti apa yang dikembangkan di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung?
3. Bagaimana pembentukan watak kewarganegaraa santri di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung?

4. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Pesantren Daarut Tauhiid dalam membudayakan nilai-nilai demokrasi untuk membentuk watak kewarganegaraan santri dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (1997:538) tujuan adalah arah yang dimaksudkan, cita-cita yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan. Dengan demikian dalam melakukan sebuah kegiatan tentunya mengandung makna yang hendak dicapai setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian dalam desain riset dan landasan teori ini yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Mengetahui bagaimana membudayakan nilai-nilai demokrasi di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung.
2. Mengidentifikasi budaya demokrasi seperti apa yang dikembangkan di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung.
3. Mengetahui bagaimana pembentukan watak kewarganegaraan santri di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung.
4. Mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang dihadapi Pesantren Daarut Tauhiid dalam membudayakan nilai-nilai demokrasi untuk membentuk watak kewarganegaraan santri dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah kegunaan dari segala sesuatu yang dilakukan. Contohnya manfaat dalam belajar adalah menjadi pintar dan mengetahui banyak hal dari yang dipelajari karena dengan belajar dapat membuka jendela dunia. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (1997:377) manfaat adalah faedah, guna, dan fungsi. Dengan demikian manfaat dalam desain riset dan landasan teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Membudayakan Nilai-Nilai Demokrasi Di Pesantren Untuk Membentuk Watak Kewarganegaraan Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung). Secara garis besar hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun hal-hal yang diharapkan dengan adanya penelitian yang akan dilakukan nantinya terutama dari segi teoritisnya adalah *Pertama*, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian membudayakan nilai-nilai demokrasi di pesantren untuk membentuk watak kewarganegaraan santri. *Kedua* hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan masalah pengembangan budaya demokrasi di pesantren untuk membentuk watak kewarganegaraan santri. *Ketiga*, saat ini diperlukan sikap warga negara yang memiliki berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, dan mempunyai pandangan luas untuk masa depan, karena yang dapat membangun sebuah negara adalah warga negara itu sendiri, yang merupakan output dari pendidikan. Lebih khusus lagi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan pada umumnya, dan khususnya pengembangan budaya demokrasi di pesantren dalam membentuk watak kewarganegaraan santri.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Untuk Pesantren

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian bagaimana pesantren sebagai jalur formal mampu memberikan sumbangannya dalam membentuk perilaku dan sikap positif santri. Pihak pesantren dapat menerapkan pendekatan yang tepat dalam membina perilaku dan sikap positif santri.

b. Untuk Santri

Santri dapat mengetahui bentuk perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Pondok Pesantren. Santri dapat menerapkan segala peraturan yang dibuat Pesantren dalam upaya pengembangan dan membentuk watak kewarganegaraan santri.

c. Untuk Guru-guru (Ustadz dan Ustazah)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh para Ustadz dalam menggunakan proses pembelajaran demokrasi yang mendorong dan

menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat, sebagai upaya pengembangan dan membentuk watak kewarganegaraan santri. Mendorong para Ustadz dan Ustadzah untuk lebih meningkatkan perannya sebagai pembimbing dalam pembinaan sikap dan perilaku santri.

d. Untuk Orang Tua Wali

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan oleh para orangtua supaya lebih mengenal pendidikan di Pesantren dalam mendidik dan membimbing anaknya dalam pembinaan sikap dan perilaku.

e. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat mendukung pesantren dalam usaha mencetak santri yang baik dan berguna di masyarakat kelak. Masyarakat dapat mengetahui keunggulan pesantren dalam pembinaan budaya demokrasi yang didasarkan pada kebiasaan santri untuk menghargai dan menumbuhkan berkembang nilai-nilai kebebasan, toleransi, dan kepercayaan untuk mengembangkan dan membentuk watak kewarganegaraan santri.

f. Untuk Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan adanya hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya bisa memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai kehidupan budaya demokrasi di pesantren untuk mengembangkan dan membentuk watak kewarganegaraan santri, dengan demikian para Dosen serta seluruh civitas akademika bisa bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu dalam menata kehidupan dunia pesantren yang lebih kondusif.

g. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai budaya demokrasi di pesantren untuk mengembangkan dan membentuk watak kewarganegaraan santri, serta bisa dijadikan landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya karena ilmu pengetahuan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia yang juga selalu dinamis

karena sifat manusia yang selalu tidak puas, oleh karena itu manusia harus selalu berusaha untuk terus mengembangkan pengetahuan sampai pada akhir hayatnya.

h. Untuk Penulis

Dengan adanya penelitian yang akan dilakukan, diharapkan bisa memberikan sebuah pemahaman baru tentang budaya demokrasi di Pesantren untuk mengembangkan dan membentuk watak kewarganegaraan santri, sehingga kedepan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau panduan dalam usaha membudayakan nilai-nilai demokrasi di Pesantren untuk mengembangkan dan membentuk watak kewarganegaraan santri.

E. Struktur Organisasi Tesis

Adapun struktur dalam penyusunan tesis ini terdiri atas 5 (Lima) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. Bab I (Pendahuluan) yang terdiri dari; **1) Latar Belakang Penelitian**, adalah bagian yang memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Di dalamnya penulis memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini. Selain itu juga terdapat pemosisian topik dan mampu menunjukkan adanya *gap* (kekosongan) yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang akan diteliti. Kemudian dalam bagian ini juga ditampilkan secara ringkas hasil penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya mengenai topik yang akan diteliti lebih lanjut.

2) Rumusan Masalah Penelitian, adalah bagian yang memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas penelitian yang dilakukan, namun tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi pertanyaan. Dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, penulis mengidentifikasi topik atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.

3) Tujuan Penelitian, adalah bagian yang mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan awal dalam penelitian

juga merupakan langkah-langkah awal yang mengarahkan penelitian pada pencapaian tujuan sesungguhnya.

4) Manfaat Penelitian, adalah bagian yang memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat atau signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari salah satu atau beberapa aspek yang meliputi: (1) manfaat atau signifikansi **dari segi teori** (mengatakan apa yang belum atau kurang diteliti dalam kajian pustaka yang merupakan kontribusi penelitian), (2) manfaat atau signifikansi **dari segi kebijakan** (membahas perkembangan kebijakan formal dalam bidang yang dikaji dan memaparkan data yang menunjukkan betapa seringnya masalah yang dikaji muncul dan betapa kritisnya masalah atau dampak yang ditimbulkannya), (3) manfaat atau signifikansi **dari segi praktik** (memberikan gambaran bahwa hasil penelitian dapat memberikan alternatif sudut pandang atau solusi dalam memecahkan masalah spesifik tertentu), dan (4) manfaat atau signifikansi **dari segi isu serta aksi sosial** (penelitian mungkin bisa dikatakan sebagai alat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya aksi).

5) Penjelasan Istilah, adalah bagian yang memuat sistematika penulisan tesis dengan memberikan gambaran tentang istilah. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan istilah-istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi pengertian dari setiap istilah tersebut.

6) Struktur Organisasi Tesis, adalah bagian yang memuat sistematika penulisan tesis dengan memberikan gambaran kandungan setiap bab, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah kerangka utuh tesis.

b. Bab II (Kajian Pustaka), adalah bagian yang memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian. Bagian ini peneliti membandingkan, mengontraskan, dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti menjelaskan posisi/ pendiriannya disertai dengan alasan-alasan yang logis. Bagian ini juga

menampilkan "mengapa dan bagaimana" teori dan hasil penelitian para pakar terdahulu diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya, misalnya saja asumsi penelitian yang dirumuskan. Pemaparan kajian pustaka dalam tesis ini bersifat analitis dan sumatif, mencakup isu-isu metodologis, teknik penelitian dan juga topik-topik yang berkaitan.

c. Bab III (Metode Penelitian), adalah bagian prosedural yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan. Karena penulis melakukan wawancara mendalam (*in dept interview*), pengamatan, studi dokumen, dan partisipasi dalam penelitian ini, maka pola paparan disesuaikan dengan pendekatan kualitatif. Adapun pola pemaparannya adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Penelitian, adalah bagian yang menjelaskan secara eksplisit detail jenis desain spesifik yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, metode penelitian. **2) Lokasi dan Partisipan Penelitian**, adalah bagian yang menjelaskan tentang tempat dimana penelitian dilaksanakan. Sementara waktu penelitian merupakan target yang diharapkan peneliti dalam menyelesaikan laporan tesis sebagai tugas akhir penelitian. Partisipan Penelitian, adalah bagian yang menjelaskan partisipan yang terlibat dalam penelitian. Jumlah partisipan yang terlibat, karakteristik yang spesifik dari partisipan, dan dasar pertimbangan pemilihannya, serta situs di mana penelitian dilaksanakan.

3) Definisi Oprasional, merupakan pembatasan tentang hal-hal yang diamati. **4) Instrumen Penelitian**, yang bertindak sebagai instrumen penelitian adalah peneliti sendiri agar dapat mengungkap fakta-fakta disitus penelitian. **5) Prosedur penelitian**, adalah terdiri dari atas beberapa sub yaitu tahapan persiapan tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian. Hal ini dilakukan supaya proses penelitian bisa maksimal dan selesai tepat waktu.

6) Teknik Pengumpulan Data, adalah bagian yang menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana penelitian dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara mendalam, pengamatan dan partisipasi pada program yang akan diteliti. Hal ini dilakukan supaya data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terpenuhi, dapat di olah dengan baik, dan hasil penelitiannya dapat bertanggung jawabkan.

7) Teknik Pengolahan dan Analisis Data, adalah bagian yang menjelaskan secara rinci dan jelas langkah-langkah yang ditempuh setelah data berhasil dikumpulkan. Apabila ada kerangka analisis khusus berdasarkan landasan teori tertentu, penulis akan menjelaskan bagaimana kerangka tersebut diterapkan dalam menganalisis data yang diperoleh agar dapat menghasilkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Secara umum alur dalam analisis data kualitatif, peneliti akan berbicara banyak mengenai langkah-langkah reduksi, penyajian data, triangulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta sintesis dari hasil pelaksanaan rangkaian tahapan tersebut.

d. Bab IV (Temuan dan Pembahasan), adalah bagian yang menjelaskan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti menyampaikan hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Bagian temuan dan pembahasan sebaiknya dimulai dengan ringkasan singkat mengenai temuan penelitian, dengan mengatakan kembali tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pemaparan temuan dan pembahasan pada penelitian kualitatif, yaitu peneliti menyampaikan hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Bagian temuan dan pembahasan

sebaiknya dimulai dengan ringkasan singkat mengenai temuan penelitian, dengan mengatakan kembali tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif biasanya lebih menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan perilaku daripada menggunakan data yang bisa dianalisis secara statistik. Dalam memahami data kualitatif, peneliti melakukan analisis induktif, dan dalam analisis ini ada dua kegiatan yang dilakukan. Pertama adalah pengelompokan (*unitizing*), yaitu kegiatan memberikan kode yang mengidentifikasi unit informasi yang terpisah dari teks. Kedua adalah kategorisasi (*categorizing*), yaitu menyusun dan mengorganisasikan data berdasarkan persamaan makna.

Proses ini memerlukan revisi, modifikasi, dan perubahan yang berlangsung terus menerus sampai unit baru dapat ditempatkan dalam kategori yang tepat dan pemasukan unit tambahan menjadi suatu kategori dan tidak memberi informasi baru. Dalam memaparkan data, peneliti akan menggambarkan konteks di mana suatu kejadian terjadi. Peneliti memperlihatkan upaya untuk membahas setiap potongan data yang telah berhasil dikumpulkan.

e. Bab V (Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi), adalah bagian yang berisi simpulan, rekomendasi, dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat. Simpulan akan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

Rekomendasi yang ditulis setelah simpulan ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian, (Buku Panduan Karya Ilmiah UPI, (2015:38-39). Terakhir adalah saran yakni masukan yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian hal ini perlu dilakukan supaya dikemudian hari penelitian-penelitian yang sama bisa menghasilkan penelitian yang kredibel dan akuntabel.